BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Perubahan Iklim
Edisi : 29/September/2007
Hari : Sabtu
Halaman : 13

Indonesia Menepis Tuduhan
Dibentuk Tim Inventarisasi GRK

Jakarta, Kompas - Indonesia menepis cap sebagai negara emitor karbon ketiga di dunia yang dilontarkan sebuah lembaga nonpemerintah Wetland International. Kelemahan-kelemahan cara penghitungan yang mendasari pendapat tersebut dibongkar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jumat (28/9).

Dalam jumpa pers yang dibuka Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Said D Jenie dihadirkan ahli meteorologi dari Unit Teknik Modifikasi Cuaca Edvin Aldrian, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Jana T Anggadiredja, serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Mezak A Ratag.

Pernyataan bahwa Indonesia adalah emitor CO^2 ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan China dilontarkan tahun 2006 di Nairobi, Kenya. Pernyataan Wetland International itu, urai Edvin, lemah dengan lima alasan. Pertama, publikasi tahun 2006 oleh Wetland International berdasarkan perhitungan Page, yaitu hanya pada kebakaran lahan gambut tahun 1997—ketika itu terjadi El-Nino (yang berdampak kekeringan di Indonesia). Pada tahun-tahun selanjutnya, tahun 1998 hingga sekarang, belum ada penelitian yang komplet.

"Padahal, ada korelasi 90 persen antara titik api dan El Nino," tegas Edvin. "Indonesia adalah korban variasi tahunan iklim regional," tambahnya.

Alasan kedua, jika dibandingkan dengan laporan tentang kebakaran tahun 1997 yang dilakukan Duncan, Levine, Heil, Langmann, dan (Edvin) Aldrian, angka hasil penelitian Page—yang digunakan Wetland—lebih tinggi. "Angka maksimum penelitian Wetland 13 kali lipat angka minimum sehingga rata-ratanya terlalu banyak biasnya," ujarnya.

Yang ketiga, lanjut Edvin yang ditegaskan lagi oleh Mezak, estimasi ini hanya memasukkan faktor kebakaran hutan tanpa memasukkan daya serap karbon oleh hutan saat tidak terjadi kebakaran. Asumsi yang diambil juga mengandaikan seluruh hasil pembakaran berupa CO^2.Mezak menambahkan, dari data satelit Pusat Satelit Antariksa Eropa (ESA), kondisi kebakaran terparah Indonesia tahun 1997 dan 2006 ternyata tidak lebih parah dari kebakaran di Brasilia dan Benua Afrika.

Sementara alasan kelima, tambah Mezak, dari pengamatan konsentrasi CO^2 di stasiun meteorologi di Koto Tabang, Bukit Tinggi—stasiun standar resmi Organisasi Meteorologi Dunia (WMO)—konsentrasinya lebih rendah dari Mauna Loa, Hawaii. Kondisi yang sama terjadi pada penelitian empat tahun terakhir—tahun 2006 terjadi kebakaran hutan yang hebat.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

"Yang pasti, jika dibandingkan dengan Amerika tidak bisa karena Indonesia tidak dihitung faktor penyerapan CO^2-nya, sedangkan Amerika itu dihitung," ujar Mezak.

Jana menambahkan, penyerapan karbon selain oleh hutan juga lautan. Persoalannya, penyerapan karbon oleh lautan tidak masuk dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Inventarisasi

Sementara itu, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) selaku National Focal- Point masalah perubahan iklim di Indonesia akan membentuk institusi untuk menangani inventarisasi data gas rumah kaca (GRK). Demikian dikatakan Dadang Hilman, Kepala Bidang Perubahan Iklim KLH, pada acara yang digelar BPPT tersebut.

Menurut dia, pembentukan lembaga ini penting karena selama ini perhitungan emisi GRK, terutama CO>sub<2>res<>res<, baru dilakukan di sektor kehutanan, belum di sektor lain. "Perhitungannya masih terpisah-terpisah," ujarnya.

Mengetahui rencana itu, Idwan Suhardi, Deputi Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Iptek Kementerian Negara Riset dan Teknologi, mengharapkan KLH hendaknya melibatkan institusi riset yang memiliki fasilitas pemantauan memadai.

Saat ini pemantauan atmosfer dan lapisan udara atas di Indonesia dilakukan BPPT, BMG, serta Lapan (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional) untuk berbagai parameter. Pembentukan institusi dimulai tahun ini dengan pertemuan informal antarinstansi terkait. Inventori CO2 diharapkan selesai dua tahun. (YUN/ISW)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup